



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI IX DPR RI
(KEMENTERIAN KESEHATAN, KEMENTERIAN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI,
BKKBN, BADAN POM, ASKES, JAMSOSTEK, BNP2TKI DAN DJSN)**

Tahun Sidang	: 2009-2010
Masa Persidangan	: II
Jenis	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Dengan	: Palang Merah Indonesia.
Sifat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 18 Februari 2010
Waktu	: Pukul 10.00 WIB - selesai
Ketua Rapat	Dr. Ahmad Nizar Shihab, Sp.An /Wakil Ketua Komisi IX DPR RI
Sekretaris	: Dra. Tri Udiartiningrum/Kabag. Sekretariat Komisi IX DPR RI
Tempat	: Ruang Rapat Komisi IX DPR RI Gedung Nusantara I Jln. Jend. Gatot Subroto Jakarta
Acara	: Peran PMI dalam pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia
Jumlah kehadiran	: Anggota dari 45 Anggota Komisi IX DPR RI, orang Ijin,

I. PENDAHULUAN

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Palang Merah Indonesia dibuka pukul 10.10 WIB dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. POKOK-POKOK PEMBICARAAN

1. Palang Merah Indonesia ditugaskan pemerintah dalam pelayanan darah sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1980 tentang Transfusi Darah. PMI juga ditugaskan untuk selalu siap siaga dalam menanggulangi bencana nasional, baik dalam pengorganisasian relawan dan transfusi darah.

2. Penyediaan darah oleh PMI sesuai standard WHO ditargetkan sebesar 2% dari jumlah penduduk nasional sebesar 4 juta kantong darah. Pada tahun 2008 PMI baru mencapai target 67% kebutuhan stok darah atau 1,7 juta kantong darah.
3. PMI sedang melakukan upaya pencegahan impor kantong darah dan perlengkapannya yang berkaitan dengan transfusi darah melalui pendirian pabrik kantong darah dan obat yang berkaitan dengan darah di Indonesia. Selama ini impor kantong darah dilakukan dari Singapura.
4. Biaya operasional untuk mendapatkan 1 kantong darah sebesar Rp. 280.000,-. Pasien rumah sakit yang tidak mampu akan disubsidi melalui program Jamkesmas.
5. Penyebab biaya pengelolaan darah tidak mencukupi karena subsidi pemerintah pusat dan daerah sangat minim, subsidi reagensia dari APBN tidak dapat dijamin kelanjutannya dan Biaya Pengganti Pengolahan Darah (BPPD) dari pasien juga tidak mencukupi.
6. Upaya PMI dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersedia melakukan donor darah, salah satunya antara lain melakukan sosialisasi kepada masyarakat melalui pendirian 100 gerai (*outlet*) di tempat keramaian seperti mall dan kampus. Upaya untuk membangun PMI agar menjadi lebih besar membutuhkan investasi yang besar.
7. setiap rumah sakit besar harus mempunyai bank darah. Hal ini merupakan salah satu upaya untuk mengurangi resiko kematian Ibu/bayi. Tahun 2010 dan 2011, PMI akan mengupayakan untuk tidak tergantung kepada laboratorium luar negeri, diantaranya dengan mengadakan kerja sama dengan laboratorium bio molekul Eykman Jakarta.
8. Dari jumlah donor darah yang masuk, sebanyak 2,71 % darah yang dikumpulkan tidak dapat digunakan karena :
 - a. HIV (+) : 0,07%
 - b. Hepatitis B (+) : 1,78%
 - c. Hepatitis C (+) : 0,59%
 - d. Sifilis (+) : 0,37%
 - e. Biaya pemusnahan darah infeksius ini cukup tinggi.
 - f. Berisiko penularan infeksi untuk petugas.
9. Dari keseluruhan Unit Transfusi Darah (UTD) di tanah air, yang berkategori baik 22 UTD, berkategori standard sebanyak 103 UTD dan berkategori sangat minim berjumlah 86 UTD.
10. PMI mengharapkan DPR dan pemerintah mengalokasikan anggaran untuk pelayanan darah bagi keperluan :
 - a. Pengadaan reagensia infeksi (HIV, HBsAg, HCV dan Sifilis) dan kantong darah untuk donasi \pm 3 juta kantong pada tahun 2010 diperkirakan membutuhkan biaya Rp. 360 Milliar.

- b. Pelaksanakan pengolahan plasma melalui proses *fraksionasi*, oleh karena saat ini banyak plasma terbuang padahal plasma mengandung faktor VIII dan IX, globulin, albumin serta fibrinogen untuk kegunaan pengobatan.
 - c. Biaya penggantian dan pemeliharaan peralatan pelayanan darah (dari APBD).
 - d. Pembiayaan darah bagi orang miskin (dari APBD).
 - e. PMI mengharapkan DPR RI dan Menpan mengalokasikan formasi PNS untuk tenaga teknisi transfusi darah di UTD.
11. Adanya masukan PMI tidak hanya mengurus masalah transfusi darah saja, namun diharapkan dapat membantu masyarakat yang membutuhkan pencangkokan ginjal, karena selama ini masyarakat mencari ginjal ke luar negeri dan dilaksanakan secara ilegal dan sembunyi-sembunyi.
 12. Masyarakat miskin yang membutuhkan darah dan yang akan menjadi donor darah hendaknya tidak dipersulit. Bila memungkinkan masyarakat miskin tidak dikenakan biaya bila membutuhkan darah. Masyarakat banyak yang belum sehat sehingga darahnya tidak memenuhi syarat didonorkan. Perlu sosialisasi agar masyarakat mau dan sadar mendonorkan darahnya secara aktif.
 13. Anggaran PMI yang diterima dari Pemerintah tidak mencukupi namun demikian diharapkan PMI dapat membantu program pemerintah dalam rangka penurunan angka kematian ibu dan bayi. Diusulkan agar kesejahteraan petugas PMI ditingkatkan sehingga para petugas dapat bekerja dengan baik.
 14. Peran PMI dimasa mendatang harus diperkuat melalui penguatan struktur organisasinya. PMI diharapkan memberantas praktek jual beli darah dan perlu mengupayakan agar masyarakat miskin tidak dikenakan biaya sedikitpun saat memerlukan darah di rumah sakit.

III. CATATAN PENTING

Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi IX DPR RI dengan Palang Merah Indonesia pada hari ini menghasilkan catatan penting sebagai berikut :

1. Komisi IX DPR RI mendorong PMI untuk melakukan penguatan kelembagaan, penambahan dan peningkatan kualitas personil (PNS/non PNS), pembukaan gerai (*outlet*) donor darah di lokasi keramaian, kecepatan pelayanan, serta sosialisasi kepada masyarakat untuk menjadi pendonor sukarela yang aktif, guna pengoptimalan tugas dan peran PMI.
2. Komisi IX DPR RI mendukung penuh upaya-upaya yang dilakukan PMI untuk merealisasikan produksi kantong-kantong darah dan kebutuhan pelayanan darah dalam negeri terkait pemenuhan kebutuhan darah di Indonesia yang memenuhi persyaratan kesehatan.

3. Komisi IX DPR RI mendukung peningkatan peran PMI dalam peningkatan subsidi untuk reagensia dan fasilitas lainnya, jumlah dan kualitas UTD di Indonesia melalui peningkatan APBN dari Kementerian Kesehatan RI dan APBD, sebagaimana diamanatkan UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Komisi IX DPR RI sepakat dengan PMI untuk mewujudkan terbentuknya Undang-undang sebagai tindak lanjut ratifikasi konvensi Jenewa 1958 tentang Kepalangmerahan dan tugas-tugas kemanusiaan lainnya.
5. Komisi IX DPR RI mendorong PMI untuk membina kerjasama dengan pemerintah daerah dalam peningkatan peran PMI.

Rapat diakhiri pukul 12.50 WIB.

PIMPINAN KOMISI IX DPR RI
Wakil Ketua,



dr. AHMAD NIZAR SHIHAB, Sp.An

